

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti atau Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Asnudin, 2005	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat	Metode Analisis	Proyek infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan.
2	Yogi Yadi Putra, 2015	Peran Badan Usaha Milik Desa	Metode Kualitatif	Efektivitas pemberdayaan

		Tandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan		ekonomi yang diimplementasikan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung belum mampu memberikan efek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung.
3	Ahmad Sururi, 2015	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Pembanguna Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	Metode Deskriptif	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sudah melaksanakan 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
4	Abdur Rahman, Rosmita, 2004	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	Metode Deskriptif Kuantitatif	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka kabupaten indragiri hilir,

				terdapat persentase sebesar 80,00% dengan katagori “Tinggi” Artinya Masyarakat Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.
5	Sri Hardianti, Hasan Muhammad dan Muhtar Lutfi, 2014	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampata Kota)	Metode Deskriptif	Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa

2.2 Definisi Dasar

Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang saat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu (Balai Pustaka, 2013).

Infrakstruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrakstruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayan dasar maupun pelayan sosial serta ekonomu bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2015).

2.3 Pengertian Infrakstruktur

Menurut Macmillan Dictionary of Modern Economics (2016), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Larimer (2014) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem. Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Banyak definisi dari bacaan mengenai infrastruktur menunjukkan adanya beberapa kesamaan unsur (Slootweg dan Verhoef 1999) seperti: (1) Infrastruktur adalah suatu sistem yang besar, (2) Infrastruktur memiliki dimensi teknologi yang kuat, (3) Infrastruktur terdiri dari komponen fisik yang tidak dapat di pindahkan, (4) Infrastruktur memberikan jasa yang penting(necessary)dan sulit tergantikan (*hardly replaceable*).

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonomi juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur.Hirschman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan.Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.

Pemerintah melalui PP No.42/2005 tentang KPPI, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu:infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, listrik, dan pengangkutan migas. Penggolongan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang merupakan kepentingan umum dan dibutuhkan masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. Pengertiandiatur tidak sama dengan dibangun oleh pemerintah, karena penyediaan infrastruktur tersebut dapat bekerja sama dengan badan usaha, seperti yang diatur dalam PP RI N0.67/2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

2.3.1 Jenis Infrastruktur Perdesaan

Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009 antara lain berupa (1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan (2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan, dan (3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (Pedoman PPIP 2006).(4) Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai/danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api, (5) Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana pembuangan sampah yang meliputi pengangkut dan pembuangan, (6) Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, (7) Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit listrik dan transmisi/distribusi tenaga listrik, (8) Infrastruktur minyak dan gas, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas.

2.3.2 Kriteria Infrastruktur

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (1) memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawara desa (2) langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setemoat terutama kelompok miskin (3) penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009 serta (5) memprioritaskan pemberian

kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal dan (6) penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat (7) merupakan infrastruktur yang dapat dikelola masyarakat (8) menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun (9) tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial dan budaya.

2.4 Perekonomian Masyarakat

2.4.1 Perekonomian Masyarakat di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Negara akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tanpa adanya pertumbuhan yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak senantiasa menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berpotensi melahirkan ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir pembangunan.

Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia saat ini adalah mengatasi persoalan ketimpangan yang tidak hanya terjadi dalam dimensi individu atau rumah tangga tetapi juga wilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama lebih dari tiga dekade terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, namun pada saat yang bersamaan tingkat

kesenjangan pendapatan juga tinggi. Data kemiskinan selama 1970–2017 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan 13,9 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 19,0 persen (BPS, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian.

Sejumlah literatur menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong perubahan ketimpangan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berperan signifikan dalam pengembangan wilayah. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangannya (Calderón & Servén, 2014; Démurger, 2011; Maryaningsih, Hermansyah & Savitri, 2014). Hal ini karena perkembangan ekonomi telah menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Siregar & Sukwika (2017), investasi memainkan peranan penting dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktivitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi. Dengan demikian, perkembangan infrastruktur

dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai keterkaitan/dampak kesenjangan pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan di Indonesia, baik ketimpangan individu/rumah tangga dan ketimpangan wilayah menjadi menarik dan strategis untuk dikaji, karena hal ini dapat memberikan masukan dan informasi yang memadai bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk mengakselerasi pengurangan kesenjangan pembangunan infrastruktur dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dinamika terkini kesenjangan (disparitas) infrastruktur dan kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah di Indonesia; (2) mengukur dan menganalisis tren indeks ketimpangan infrastruktur dan indeks ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia dan (3) menganalisis keterkaitan/dampak kesenjangan infrastruktur terhadap kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia.

2.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi merupakan program yang dijalankan dengan orientasi memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan agar mampu memenuhi kebutuhannya dan mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi bersifat pendekatan terhadap masyarakat yang merupakan pemegang kendali dalam program pemberdayaan. Masyarakat merupakan objek yang diberdayakan dalam berbagai program yang telah dijalankan. Pemberdayaan adalah proses peningkatan

kemampuan seseorang baik dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya yang dilakukan dengan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam meningkatkan produktivitas rakyat. Pemberdayaan ekonomi yang mengarah kepada masyarakat bertujuan agar membentuk daya masyarakat dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat dalam memperoleh gaji/upah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kedudukannya dalam masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat tidak harus terfokus kepada upaya dalam peningkatan produktivitas, peluang kerja dan penanaman modal usaha. Tetapi harus menyertakan berbagai usaha terutama dalam tatanan struktur perekonomian masyarakat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi tentunya mendukung dalam mengembangkan potensi masyarakat terhadap peran dalam produktivitas dan efisiensi kegiatan yang dijalankan dan memperbaiki beberapa akses seperti akses sumber daya, akses teknologi, Akses pasar dan akses terhadap sumber finansial. Akses ini merupakan sebuah tanggung jawab (responsible) oleh pemerintah yang memegang peranan sebagai penanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, yang tentunya diikuti dengan kesadaran dan peranan masyarakat dalam menyukseskan sebuah upaya memperbaiki tatanan perekonomian di wilayah pedesaan secara kekeluargaan.

2.4.3 Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau keberhasilan dalam menjalankan setiap kegiatan. Sedangkan dalam kamus ilmiah yang ada efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan tujuan, hasil ataupun penunjang keberhasilan. Para ahli dalam bidang ekonomi mengartikan bahwa efektivitas adalah capaian yang diperoleh dari sebuah tujuan, sasaran berdasarkan dengan tujuan bersama. Tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan akan menunjukkan tingkat efektivitas, yang dapat diperoleh melalui usaha yang telah dijalankan. Efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi memiliki beberapa tingkatan yaitu:

1) Efektivitas individu didasarkan pada keberhasilan dari segi individu dalam mengelola dan menjalankan sebuah organisasi. 2) Efektivitas kelompok Pada kenyataannya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan yaitu saling bekerja sama dalam sebuah organisasi. Efektivitas kelompok dapat dicapai apabila setiap elemen yang ada dalam sebuah organisasi mampu memberikan kontribusi secara penuh. 3) Efektivitas organisasi Efektivitas organisasi dapat dicapai apabila efektivitas individu dan kelompok dapat dicapai dengan baik, yaitu melalui sinergitas dalam mendapatkan hasil lebih pada tingkatan dari jumlah hasil pada tiap bagian. Efektivitas organisasi diartikan sebagai tingkat dalam mewujudkan tiap sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas menurut Sondang P. Siagian diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia dan ditetapkan di awal sebagai upaya dalam menghasilkan barang maupun jasa usaha yang dilaksanakan. Apabila mampu mencapai sasaran

yang telah ditetapkan maka usaha yang dilakukan memberikan sebuah efektivitas. Efektivitas merupakan sebuah pemanfaatan berbagai sumber daya, sarana maupun prasarana secara terakomodir guna mencapai hasil yang sesuai dengan harapan pada waktu tertentu.

2.5 Sasaran pemberdayaan ekonomi

Sasaran pemberdayaan ekonomi merupakan masyarakat dalam bentuk pemukiman. Pemberdayaan ekonomi ditujukan kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Pemberdayaan ekonomi yang ditujukan atau menjadikan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara bertahap, membentuk sebuah lembaga yang mampu mengatasi masalah kemiskinan pada setiap daerah dengan menghimpun dan mengkoordinasi berbagai sumber daya dan penanggulangan kemiskinan melalui program yang dijalankan oleh pemerintah.

Sasaran dalam pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan sebagai penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif, pemantapan sistem pendataan desa, membentuk hubungan yang baik dalam komunikasi antar masyarakat, meningkatkan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dalam pemberdayaan ekonomi sasaran atau tujuan dari upaya pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat merupakan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di wilayah pedesaan. Pemberdayaan ekonomi sangat perlu dilaksanakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan yaitu membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan, kebodohan ataupun rasa takut dalam mengambil sebuah keputusan. Kesejahteraan juga berkaitan dengan suatu kondisi dimana setiap kebutuhan masyarakat mampu terpenuhi baik kebutuhan spiritual, material bahkan kebutuhan sosial sekalipun.

Tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- b) Pemulihan tujuan sosial dalam mencapai kemandirian
- c) Membentuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan
- d) Menguatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan.
- e) Meningkatkan kualitas dalam mengelola, merencanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.

2.6 Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan pemberdayaan ekonomi memiliki Tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Tentunya untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan suatu pendekatan terhadap individu ataupun kelompok agar program pemberdayaan ekonomi dapat dicapai.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, melihat kondisi sekarang bahwa pemberdayaan marak dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menciptakan kemampuan sumber daya manusia terutama di wilayah pedesaan. lingkup desa yang terdiri dari mayoritas masyarakat miskin memerlukan suatu pemberdayaan ekonomi agar mampu menciptakan kemampuannya dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif dan kelembagaan kelompok.

Kehadiran BUMDes di wilayah pedesaan merupakan suatu pendekatan yang paling strategis kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah atas dasar mampu menggerakkan roda ekonomi desa itu sendiri.

2.7 Masyarakat Perdesaan

Masyarakat merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan perhatian dan menganalisis berbagai kegiatan ekonomi seperti membangun hubungan ekonomi dengan agama, pendidikan, budaya dan sebagainya. Kegiatan perekonomian yang dijalankan seperti pemberdayaan masyarakat tentunya tidak berjalan begitu saja. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di wilayah perkotaan memiliki perbedaan yang begitu besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan. salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi sumber daya yang ada di wilayah pedesaan.

2.7.1 Definisi Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan atau dikenal dengan istilah rural community adalah sebuah kelompok kecil yang berada dalam suatu wilayah hukum yang terdiri atas kebiasaan, adat istiadat dan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Menurut Hasan Sadily, masyarakat adalah kelompok besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, dengan ikatan pertalian yang mempengaruhi hubungan emosional satu dengan yang lainnya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang lama mendiami suatu daerah dan saling bekerjasama, sehingga mampu membentuk kelompok dalam mengatur diri, berfikir dengan batasan tertentu. Dalam UU No.6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum dengan batas wilayah, kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan, kebutuhan masyarakat dan hak yang diakui oleh pemerintahan Negara republik Indonesia.

Masyarakat yang ada di wilayah Indonesia pada dasarnya sangatlah majemuk yang artinya tidak hanya berasal dari satu suku, ras, agama dan bahasa saja melainkan terdiri dari ratusan bahkan ribuan perbedaan yang ada. Masyarakat pedesaan memiliki adat istiadat yang harus dijaga. Selain itu, wilayah pedesaan sangat rentan terhadap masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya akses informasi dan sebagainya. Permasalahan inilah yang menjadi sebuah polemik dalam bidang ekonomi yang belum bisa teratasi dengan baik terutama di wilayah pedesaan. Padahal jika ditinjau dari aspek kondisi wilayah pedesaan, potensi alam yang ada

diwilayah pedesaan sangatlah melimpah baik dari pegunungannya, perkebunan, hingga wilayah pesisirnya.

Desa dipandang sebagai wilayah yang kecil, tersudut, terpencil dan tempat untuk bernaung. Padahal untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada diwilayah perkotaan, hampir dari seluruh kebutuhan atau bahan pokok berasal dari pedesaan. Ada beberapa pandangan yang berkaitan dengan pedesaan, yaitu sebagai berikut:

pertama, Desa dikatakan sebagai kampung halaman. Tempat kelahiran merupakan asal dari lahirnya seseorang dan desa merupakan tempat untuk kembali berpulang bagi perantau yang ada diwilayah perkotaan. Fenomena ini membentuk sebuah urbanisasi yang mengakibatkan pembangunan diwilayah pedesaan menjadi bias dibanding wilayah perkotaan, sumber daya yang ada di desa mengalami pengurangan karena beranjak ke wilayah kota yang mengakibatkan desa hanya didiami oleh anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Kedua, Desa dikatakan sebagai wilayah terendah dalam hirarki pemerintahan. Desa dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tingkat atas dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan dan mengatur masyarakat yang ada didalamnya, dan yang ketiga desa dianggap sebagai masyarakat tanpa pemerintahan. Munculnya pemikiran ini mengakibatkan lahirnya sebuah program yang secara langsung diberikan kepada masyarakat tanpa memerhatikan pemerintahan desa.

2.7.2 Ciri Ciri Masyarakat Pedesaan

Ciri-ciri dari masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pergaulan yang dekat
- 2) Saling mengenal
- 3) Memenuhi kebutuhan dari bidang pertanian
- 4) Gotong royong

2.7.3 Permasalahan masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan hidup dan menjaga satu sama lain diantara warganya. Namun dalam lingkungan masyarakat desa, terdapat gejala-gejala atau permasalahan yang biasa menimbulkan konflik sosial, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertengkaran

Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang ada diwilayah perkotaan, masyarakat desa juga sering memiliki konflik sosial yang berpengaruh terhadap pertengkaran mental dan fisik. Konflik ini biasanya muncul dari akibat masalah sehari-hari, rumah tangga, status, gengsi dan sebagainya.

- 2) Pertentangan

Pertentangan yang terjadi di lingkungan masyarakat desa muncul dari akibat adanya perubahan adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat pedesaan. setiap desa yang ada diwilayah pedesaan biasanya tidak memiliki persamaan dalam adat istiadat.

- 3) Persaingan

Persaingan diwilayah pedesaan sudah terjadi sangat lama. Persaingan terjadi diantara orang yang ada diwilayah desa dengan warga ataupun tetangganya.

Wujud persaingan bisa berupa positif dan negatif. Persaingan dalam wujud positif adalah apabila mampu menghasilkan dan meningkatkan usaha secara bersama. Sedangkan wujud dari persaingan negatif adalah tidak mampu menghasilkan dan meningkatkan usaha, melainkan menumbuhkan sifat iri, saling

fitnah yang mengakibatkan permasalahan yang baru dalam masyarakat.

4) Kegiatan masyarakat

Aktivitas masyarakat desa tergolong padat yang dimulai dari terbitnya fajar sampai larut malam, yang mampu menunjukkan sifat dan cirak yang ada dalam diri masyarakat pedesaan. masyarakat pedesaan dikenal sebagai pekerja keras dalam menghasilkan kebutuhan diwilayah kota sehingga dapat disimpulkan

bahwa desa merupakan sumber dari ekonomi.

2.8 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. jika ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang, maka partisipasi tidak akan terjadi. Jika ada kemauan serta kemampuan tetapi tidak ada

ruang dan kesempatan untuk warga masyarakat maka partisipasi juga tidak akan terjadi.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan.

Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrembang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrembang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka

baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. sesuai dengan ini bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terutama pada program-program fisik seperti, Kantor Desa, Jalan, Jembatan, dan lainnya, meskipun adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa, semangat partisipasi masyarakat di desa belum juga terlihat

Partisipasi Masyarakat adalah bahwa partisipasi tidak hanya dipandang dari sisi fisik semata. Selama ini menurutnya ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi apabila dia sudah terlibat secara fisik seperti ikut berkerja bakti, ikut membantu material, menghadiri pengajian. Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi sebenarnya tidak sesempit itu. Pemikiran atau sumbang saran dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud partisipasi. 7 jadi dapat diartikan partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan selalu memecahkan permasalahan bersama.

Menurut Suparjan menyebutkan alasan penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut.

- a. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan handarbeni (sense of bolonging) terhadap keberlanjutan pembangunan.
- b. Dengan partisipasi masyarakat meningkatkan posisi tawar menawar harga sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal.

- c. dengan partisipasi masyarakat mampu mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya moral dari investor.

2.9 Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik alasan dari dalam, mau pun dari luar. dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantau, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu Yadap, mengemukakan tentang adanya partisipasi di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok- kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi

langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di wilayah setempat

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi banyak (yang umumnya lebih dikenal miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. di lain pihak, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas yang kaya) dalam banyak hal terdapat banyak hal memperoleh.

2.9.1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu

dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2.9.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Dalam hal ini berlaku melihat tingkat partisipasi masyarakat dimana perencanaan merupakan tahapan awal dari pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan harapan masyarakat. Menurut data yang penulis dapatkan di lapangan mengenai keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dalam perencanaan pembangunan.

2.9.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan.